



2024 DITARGET ZERO STUNTING

# Dibentuk Tim Percepatan Penanganan Hingga Kelurahan

**YOGYA (KR)** - Kota Yogya berkomitmen untuk mewujudkan zero stunting pada tahun 2024 mendatang. Berbagai upaya juga sudah dilakukan, salah satunya membentuk tim percepatan penanganan kasus tumbuh kembang bayi tersebut hingga tingkat kelurahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3 AP2KB) Kota Yogya Edy Muhammad, menjelaskan pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi program prioritas nasional. Sehingga untuk memutuskan

rantai stunting harus dimulai dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu masa sejak anak dalam kandungan hingga menjadi anak usia 2 tahun. "Dalam rangka menurunkan angka stunting Pemerintah Kota Yogya telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota serta TPPS

Kemantren dan Kelurahan," jelasnya, Kamis (8/9).

Tim percepatan tersebut memiliki tugas berjenjang sesuai tingkatannya. Seperti di tingkat kota bertugas menyusun strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting. Sedangkan TPPS di

wilayah memonitor pelaksanaan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam rangka mendeteksi dini faktor risiko stunting dan sebagai upaya pencegahan, maka dilakukan serangkaian kegiatan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan dan anak usia 0-59 bulan. "Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021

prevalensi stunting DIY berada di angka 17,3 persen dan Kota Yogya sendiri di angka 12,88 persen atau sejumlah 1.433 anak. Oleh karena itu, upaya penanggulangan stunting harus terus dilakukan," imbulinya.

Di samping itu, Pemkot juga selalu mensosialisasikan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (EL-SIMIL). Aplikasi tersebut sebagai alat monitoring dan pendampingan untuk memastikan kesiapan menikah dan hamil. Intervensi pencegahan stunting dilakukan dengan melakukan skrining melalui aplikasi itu. "Nantinya calon pengantin akan

mendapatkan sertifikat yang menjadi syarat pendaftaran pernikahan di KUA dan hasil skrining tersebut dapat menjadi input bagi petugas pendamping untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

Keberhasilan penanganan kasus stunting bergantung pada keselarasan program di tiap organisasi perangkat daerah. Bahkan hal itu juga bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak termasuk masyarakat. Pasalnya, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh lingkungan, kesehatan ibu hamil, kesejahteraan keluarga maupun pemahaman masyarakat.

Oleh karena itu Pemkot turut menggandeng berbagai pihak untuk memiliki komitmen bersama. Salah satunya ditunjukkan oleh Baznas Kota Yogya yang bersinergi dengan program pemerintah guna membantu penanganan angka stunting.

Ketua Baznas Kota Yogya Syamsul Azhari, menjelaskan pihaknya akan terus aktif mendukung program pemerintah dan turut berpartisipasi dalam menanggulangi stunting. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui program Jogja Sejahtera dan Jogja Peduli. **(Dhi) f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005